

**PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN
DI KABUPATEN BULUKUMBA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

HIKMAH TUNNNISA,M
NIM : 10400113036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR (UIN)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmah Tunnisa.M
NIM : 10400113036
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 28 Agustus 1995
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl.Veteran Bakung Per.Zarindah Permai Blok S No 8, Gowa.
Judul : Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 25 Agustus 2017

Penyusun,

Hikmah Tunnisa.M

NIM: 10400113036

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak “, yang disusun oleh Hikmah Tunnisa.M, NIM : 10400113036, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 25 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 03 Dzul-hijjah 1438 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), tanpa (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 28 Agustus 2017 M
06 Dzul-Hijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI (.....)

Munaqisy II : A.Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag (.....)

Pembimbing I : Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. (.....)

Pembimbing II: Ashabul Kahpi S.Ag., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)” dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai *rahmatan li al-'alamin* yang telah membawa umat manusia dari kesesatan kepada kehidupan yang selalu mendapat sinar ilahi.

Saya sangat meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang saya miliki, tapi karena dukungan dan bimbingan serta doa dari orang-orang sekeliling saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya saya berikan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mursalim dan Ibunda Nursiah yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa besarnya kepada penyusun. Serta keluarga besarku yang ada di Kabupaten Bulukumba dan di Makassar yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Abdillah Mustari.,M.Ag selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Bapak Dr. Achmad Musyahid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Bapak Dr. Abdillah Mustari.,M.Ag dan Bapak Ashabul Kahfi. S. Ag. M.H selaku pembimbing yang senantiasa membimbing ananda dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc.,M.HI selaku penguji I dan Ibu A.Intan Cahyani, S.Ag.,M.Ag selaku penguji II yang telah siap memberikan nasehat, saran dan perbaikan dalam perampungan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih untuk seluruh didikan, bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Zarindah Group yang selalu membantu dan memberi dukungan serta Doa agar dilancarkan urusan dalam penyusunan skripsi.
10. Keluarga besar Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum A Angkatan 2013, Saudara-saudara seperjuangan, Terima kasih untuk kalian semua, kalian saudara yang hebat dan luar biasa.
11. Keluarga KKN-R Angkatan 53 Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa, Desa Julumate'ne yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Skripsi

ini.

12. Kepada Soekarno Abdi Manaf yang telah memberikan doa, dukungan, serta perhatian. Terima kasih telah menyemangati dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Samata, 25 Agustus 2017

Penyusun,

Hikmah Tunnisa.M

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRASNSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	10
B Tinjauan Mengenai kekerasan Terhadap Anak.....	21
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Anak	29

D. Dampak kekerasan terhadap anak	33
E. Dasar Perlindungan Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian.....	43
F. Metode Pengolahan Analisis Data.....	43
BAB IV PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN BULUKUMBA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak	47
C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Implikasi Penelitian.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	;	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	fathah dan ya ^ʾ	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
-------------------------	------	--------------------	------

أ / آ...	Fathah dan alif atau yā	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan yā	Ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قليل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūṭah ada dua yaitu: *tā'* marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā'* marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

المدينة الفاضلة : al-madīnah al-fāḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭṭāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu”ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلاية : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta’murūna

النوع : al-nau’

شيء : syai’un

امرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله dīnullāh با الله billāh

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة الله hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: subḥānahū wa ta'ālā
saw.	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
M	: Masehi
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Hikmah Tunnisa.M

NIM : 10400113036

**Judul : Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba
(Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)**

Skripsi ini berjudul Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Pokok masalah dirumuskan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. 2) Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan anak.

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis dan normatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder yang bersumber dari Polres Bulukumba. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan instrument penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang lain ataupun orang tua. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu faktor ekonomi, faktor regenerasi kekerasan terhadap anak, faktor kelainan seksual dan faktor kesalahpahaman yang terjadi pada anak. Dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak sangat dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.

Implikasi penelitian 1. Diharapkan kepada kanit PPA (pelayanan perempuan dan anak) agar selalu bersabar dalam menghadapi kasus kekerasan terutama kekerasan terhadap anak karena telah menjadi tugas seorang kanit PPA untuk memperlakukan, melayani dan memberikan solusi bagi para pelaku dan korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan kewajibannya agar mereka mampu menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi segala larangannya. 2. Dengan dilakukan perubahan/revisi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 80 tentang Perlindungan Anak kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukuman atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui sosialisai ke sekolah-sekolah ataupun pengajian umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktifitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara merupakan sebuah entiti (kesatuan wilayah) dari unsur-unsur pembentukan negara¹ yang di dalamnya terdapat berbagai hubungan kepentingan dari sebuah komunitas (masyarakat setempat) yang berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah.²

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Peran agama sangat diperlukan dalam upaya Perlindungan Anak di Indonesia karena anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam misalnya, Al-Qur'an telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra ' /17:31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Global* (Bandung: PT. Alumni, 2001), h. 17.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 129.

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.³

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.⁵ Selain itu, anak merupakan tumpuan dan harapan orang tua. Oleh karena itu, anak wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi di dalam lingkungan keluarga (rumah tangga) tetapi juga dapat terjadi diluar lingkungan keluarga. Di lingkungan pendidikan pun sering bermunculan tindak kekerasan tanpa kita sadari, kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswanya, ataupun tawuran antar pelajar. Kekerasan yang di lakukan di sekolah yang marak di muat media, merupakan salah satu bukti kekerasan yang ada di lingkungan pendidikan. Kekerasan di sekolah merupakan suatu lingkaran “setan” dimana senior biasanya melampiaskan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 285.

⁴Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.1.

⁵Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia* (Bandung: PT.Citra aditya bakti, 1997),h. 2.

kemarahan kepada junior, sebagaimana mereka diperlakukan sebelumnya, dan ini akan berkelanjutan jika rantai kekerasan ini tidak ditangani segera mungkin.⁶

Kondisi ini amatlah memprihatinkan, namun bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak terutama pada lingkungan keluarga untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya.

Persoalannya adalah sejauhmana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan.

Jika ada ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan yang tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orang tua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berprasangka bahwa orang tua merekalah yang akan menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa lain disekitarnya. Mereka percaya 100% bahwa tidak ada seorang pun yang akan menyakiti dirinya. Mengamati fenomena yang semakin tidak ber'adab' terhadap hak asasi manusia terutama hak perlindungan terhadap anak itulah, penulis mencoba untuk membahasnya lebih lanjut.

Oleh sebab itu, seorang anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan. Dalam kehidupan manusia, anak merupakan individu

⁶Abdul Rahman Kanang, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan hak-hak Konstitusional Anak* (Alauddin: University Press, 2011), h. 3.

yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Akibat dari belum matangnya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa dan juga perlu adanya sebuah usaha untuk membangun kesadaran masyarakat tentang masalah kekerasan terhadap anak.

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Qur'an yang terdapat dalam surah at-Taghabun ayat 64:14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَّوْا
وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang”.⁷

Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Islam memberikan perhatian khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Karena itulah, pengasuhan dan pengajaran terhadap anak dalam islam tidak hanya terbatas pada pendidikan keluarga, tetapi juga model-model pendidikan lain. Masyarakat dengan segala potensinya dituntut untuk menyediakan lingkungan dan situasi yang baik bagi pendidikan anak-anak.⁸

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556.

⁸Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Yunani Purba, 1999), h. 27.

Anak-anak secara fitriah adalah manusia yang sempurna, dalam arti memiliki potensi akal. Adanya akal inilah yang membedakannya dari makhluk Allah lainnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai manusia, anak-anak mengalami perkembangan fisik dan non fisik sekaligus. Para pemikir boleh jadi menekankan perkembangan fisik anak pada masa awal, tetapi hal itu tidak berarti mengabaikan perkembangan jiwa anak. Pendidikan dan pengasuhan kepada anak dengan demikian memberikan perhatian pada perkembangan anak secara utuh.⁹

Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intern keluarga dan tidak layak untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam. Perlindungan anak di Indonesia sebagaimana yang diatur Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan semua pihak. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru sekitar 20% saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat.

Dunia internasional juga telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah konvensi hak anak disahkan, maka pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah

⁹ Fuaduddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, h. 28.

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan konvensi hak anak dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada konvensi hak anak dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional. Dalam mewujudkan pelaksanaan konvensi hak anak maka pemerintah Indonesia telah membuat aturan hukum dalam upaya melindungi anak. Aturan hukum tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002 kemudian di amandemen atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jadi jelaslah bahwa perlindungan anak mutlak harus dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum.

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan dengan seorang anak, maka sudah seharusnya para pengasuh, baik orang tuanya atau bukan, harus memahami ketentuan baik yang ada dalam Islam ataupun perundang-undangan yang ada di Negara Indonesia ini.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian, mengenai kekerasan terhadap anak adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap hak anak baik itu dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan dalam penelitian ini dengan judul : “Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Anak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Bulukumba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak). Khususnya kekerasan terhadap Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas dapat dideskripsikan bagaimana perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Bulukumba (Perspektif hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak). Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis mendeskripsikan sebagai berikut:

1. **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. **Kekerasan terhadap anak** merupakan perilaku tindak penganiyaan yang dilakukan oleh para orang tua, wali, atau orang lain terhadap anak-anak sepanjang mereka masih berstatus anak secara hukum.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak memang bukan satu-satunya yang pertama kali dilakukan sejauh pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas masalah tersebut dan sudah banyak buku ilmiah tentang perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kabupaten Bulukumba (perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak). Sebagai bahan referensi yang berkaitan penyusunan memakai beberapa buku artikel dari internet.

1. Perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional anak (perspektif hukum internasional, hukum positif dan hukum Islam) karya Abdul Rahman Kanang. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak, konvensi hak anak.
2. Hak asasi manusia dalam perspektif syariat Islam (mengenal jati diri manusia) karya Rusjdi Ali Muhammad. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang anak, kewajiban dan hak manusia.
3. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam karya Fuaduddin TM. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang anak perempuan dan anak laki-laki.
4. Hukum pengangkatan anak dalam perspektif Islam karya H. Andi Syamsul Alam. Dalam buku tersebut menjelaskan tentang anak dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Masalah Sosial Anak karya Bagong Suyanto. Dalam buku ini menjelaskan tentang penganiyaan anak dan masalah sosial anak.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan anak di Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kontribusi kepada khasanah ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Mengenai Anak

Arti anak menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹ Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara. Di Indonesia yang sering dipakai untuk menjadi batasan umur adalah usia 0-21 tahun. Dengan demikian bayi, balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres No 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, Unicef mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia anatra 0 sampai 18 tahun ke bawah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 21 tahun dan belum menikah, sedangkan Undang-Undang perkawinan menetapkan batas usia seorang anak adalah 16 tahun.²

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 38.

²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), h. 19.

1. Pengertian Anak dalam Islam

Al-Qur'an sarat sekali dengan muatan kisah anak-anak, khususnya anak-anak saleh keturunan para Nabi. Ada kisah Nabi Yusuf kecil dalam surat Yusuf dan kisah nasihat Luqman untuk anaknya dalam surat Luqman. Semua kisah itu menyiratkan pesan tentang pendidikan dan perlindungan anak.

Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah swt pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan, anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang tuanya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai perhiasan Hidup di Dunia

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Allah berfirman dalam QS Al-Kahfi/18: 46.

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾

Terjemahnya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”³

Ayat diatas menyatakan, bahwa anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak yang meminta

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 229.

sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang terlatih-latih adalah pemandangan indah dalam suatu keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga baru terasa jika di dalamnya terdapat anak.

b. Anak Sebagai Penyejuk Hati

Dalam AL-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurata a'yun). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua.

Ada ungkapan yang mengatakan, "Anakku permataku," Allah pun menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati dan mengajarkan kita sebuah doa agar anak yang dilahirkan jadi penyejuk hati buat orang tuanya. Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa"⁴

c. Anak Sebagai Ujian

Allah berfirman dalam QS Al-Anfal/8: 28.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

"Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian."⁵

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 336.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180.

Dalam perspektif Al-Qur'an, anak yang berfungsi sebagai perhiasan hidup dan penyejuk hati, sesungguhnya ia sebagai ujian bagi orang tuanya. Dengan nikmat anak, orang tua di uji oleh Allah Swt, apakah akan membawa anaknya menuju jalan ke neraka atau ke jalan surga. Bila orang tua berhasil mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh dan berbakti berarti orang tuanya sudah lulus. Sebaliknya, jika gara-gara terlalu mencintai anak orang tuanya sampai lalai dari mengingat Allah berarti ia gagal dalam ujian yang diberikan Allah. Kegagalan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

d. Anak sebagai Musuh Orang Tua

Jika orang tua keliru dan salah dalam mendidik anak-anaknya, maka anak tersebut akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Inilah yang diisyaratkan Al Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعَفَوْا
وَتَصَفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”⁶

Menurut ayat di atas, anak dapat menjadi musuh orang tua manakala anak sudah tidak lagi mentaati orang tuanya atau aturan agamanya. Misalnya, anak sudah terlibat jauh dengan kejahatan dan sulit dihentikan. Ketika orang tua menasihati, si anak tidak mendengarkan bahkan malah menentang. Seorang anak yang murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama, juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Seorang anak yang telah terpengaruh kepada perbuatan maksiat, seperti minuman

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 556.

beralkohol, narkoba, judi, zina, menjadi sahabat bagi setan dan musuh bagi orang tua yang beriman. Bila hal itu terjadi anak telah menjadi sumber malapetaka bagi sebuah keluarga dan masyarakat. Sehingga anak bukan lagi mendatangkan kebahagiaan, tetapi menimbulkan penderitaan bagi orang tuanya.

2. Hak-Hak Anak atas Orang Tua

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya dan orang tuanya wajib memberikan sesuatu itu pada anaknya. Mengingat tanggung jawabnya orang tua terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan menyia-nyiakan hak-hak anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁷

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seorang membunuh seluruh umat manusia. Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5: 32.

مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

⁷Sholahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Amisco, 2014), h. 139.

“Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapayang menghidupkan maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”.⁸

Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS Al-Isra'/17: 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁹

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar.

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan.

d. Hak Memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal dua tahun. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعَرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui air susu ibu, secara teoritis dalam ilmu kesehatan

dalam kebutuhan gizi baik terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuannya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.

f. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Dalam hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak tersebut dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu:¹⁰

a. Hak terhadap kelangsungan hidup yaitu, hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk

¹⁰Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT.Citra Aditya, 1999), h. 35.

memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Mengenai hak terhadap kelangsungan hidup didalam konvensi hak anak terdapat pada pasal 6 yang mewajibkan kepada setiap negara serta untuk menjamin kelangsungan hidup.

- b. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi dan tindak kekerasan. Dalam konvensi hak anak, dikemukakan atas 2 (dua) kategori:
 - 1. Pasal-pasal mengenai larangan diskriminasi anak
 - 2. Pasal-pasal mengenai larangan eksploitasi anak.
- c. Hak untuk tumbuh berkembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan aka untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangann fisik, mental, spiritual, moral dan spiritual anak.

Menurut pasal 28 ayat 1 konvensi anak, yang menyebutkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan sekaligus memberikan langkah kongkrit untuk terselenggarakan hak terhadap pendidikan. Dengan demikian dapat dikualifikasikan beberapa hak untuk tumbuh berkembang yang terdapat dalam KHA (konvensi hak anak) yaitu:

- 1. Hak untuk memperoleh informasi
- 2. Hak untuk memperoleh pendidikan
- 3. Hak untuk bermain dan rekreasi
- 4. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya
- 5. Hak untuk kebebasan berpikir, berkarya, dan beragama

- 6. Hak untuk pengembangan kepribadian
- 7. Hak untuk memperoleh identitas
- 8. Hak untuk didengar pendapatnya
- 9. Hak atas keluarga.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Dalam pasal 12 KHA diatur bahwa negara peserta menjamin hak anak untuk menyatakan pendapat dan untuk memperoleh pertimbangan atas pendapatnya itu, dalam segala hak atau prosedur yang menyangkut diri si anak.

3. Perlindungan Anak

a. Pengertian perlindungan Anak menurut Undang-Undang

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).¹¹ Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin tepenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia, kehidupan anak secara mutlak

¹¹Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 47.

membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan lebih dari anak, maka terdahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu, di bawah ini di kemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi¹² dan menurut Santy Dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹³

Pemeliharaan (perlindungan), diminta atau tidak diminta, pemeliharaan terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi. Sehingga anak merasa aman, apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan atau eksploitasi terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.¹⁴ Adapun perlindungan ini merupakan sesuatu perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat, melindungi anak adalah melindungi manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak pada suatu masyarakat, bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat, bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan

¹²Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Presindo, 1989). h. 12.

¹³Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty. 1988), h. 6.

¹⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Popular, 1989), h. 246.

kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.

b. Pengertian Perlindungan Anak dalam Islam

Dalam AL-Qur'an Allah swt berfirman QS Annisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.¹⁵

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah dalam hal fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral dan lain sebagainya. Ayat ini mengandung pesan agar kita melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun jauh-jauh hari, jangan sampai nanti ia lahir dalam keadaan tidak sehat, tidak cerdas, kurang gizi, dan terlantar tidak terpelihara.

B. Tinjauan Mengenai Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Menurut WHO (WHO, 1999) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekuatan fisik dan kekuasaan harus dilihat dari segi pandang yang luas mencakup tindakan atau penyiksaan secara fisik, psikis/emosi, seksual dan kurang perhatian.¹⁶

Kekerasan dalam arti lain juga bisa diartikan sebagai penggunaan kekuatan secara destruktif terhadap orang dan harta benda miliknya, seringkali terperangkap dalam mekanisme perdefinisi diri yang disebutkan di atas. Tentu saja, ada proses antara perbedaan sebagai basis identitas dan kelompok di satu pihak, dan kemunculan tindakan kekerasan di pihak lain. Seperti pernah dikatakan Johan Galtung, ada proses sosialisasi ketika kondisi-kondisi kekerasan menjadi bagian dari pikiran, persepsi, dan sikap manusia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum¹⁷. Jenis-jenis kekerasan itu sendiri ada banyak macamnya, salah satunya yaitu kekerasan terhadap anak yang menjadi pembahasan pada skripsi ini.

¹⁶Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*, Pena Justisia VII No. 14 (2008), h. 84.

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kekerasan yang sering dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut. Hal ini sejalan dengan definisi kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu kekerasan dimana terdapat ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap mitra dekat (orang dekat) yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kematian, trauma dan hal-hal yang berbahaya. Tindakan yang dilakukan mencakup fisik, psikologis/emosional dan seksual yang dilakukan dalam hubungan kemitraan itu. Yang dimaksud dengan mitra adalah orang tua, saudara, suami atau istri, partner/pacar, bekas istri dan bekas pacar.

Selain itu kekerasan terhadap anak juga memiliki definisi lain yaitu :¹⁸

- 1) Kekerasan berupa serangan pada bagian tubuh
 - 2) Kekerasan berupa komunikasi berisi penghinaan, malu dan takut
 - 3) Kekerasan berupa tidak bertindak yang berakibat pada kegagalan tingkat kekerasan anak.
2. Pengertian tindak kekerasan terhadap anak

Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau *child abuse* and neglect berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Sekitar 1946, Caffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (*multiple fractures*) pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya (*unrecognized trauma*). Dalam dunia kedokteran, kasus ini dikenal dengan istilah *Caffey Syndrome*.¹⁹

¹⁸<http://psikologi.or.id>. Di akses pada tanggal 28 juli 2017

¹⁹Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 27.

Kasus yang ditemukan Caffey di atas makin menarik perhatian publik ketika Henry Kempe menulis masalah ini di *Journal of the American Medical Association*, dan melaporkan bahwa dari 71 rumah sakit yang ia teliti, ternyata terjadi 302 kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak, 33 anak dilaporkan meninggal akibat penganiyaan yang didalamnya, dan 85 mengalami kerusakan otak yang permanen. Henry Kempe, menyebut kasus penelantaran dan penganiyaan yang dialami anak-anak dengan istilah *Battered Child Syndrome* yaitu: “setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain.” Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.

Kendati antara ahli satu dan yang lain menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan kasus penganiyaan yang dialami anak-anak, yang jelas semua pihak tampaknya sepakat bahwa kasus penganiyaan terhadap anak-anak bukanlah peristiwa yang hanya ada di cerita-cerita dongeng yang tidak nyata, tapi ini merupakan peristiwa sehari-hari yang tidak mustahil ibaratnya seperti gunung es yang tersembunyi didasar samudra. Artinya, selama ini hanya sebagian kecil kasus yang sempat diendus masyarakat atau terdeteksi dalam sebagian kecil penelitian, tetapi kalau mau jujur kasus semacam ini sesungguhnya dapat ditemui di semua masyarakat dan disetiap kurun waktu.

Dari klarifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk.²⁰

Pertama, kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, menngancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasaya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan

²⁰Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, h. 29-30.

hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan.

Keempat, jenis kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjuak koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang *child abuse*, menyebutkan ada empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).²¹

a. Kekerasan secara fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan perlindungan anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak.

²¹<http://www.pikiranrakyat.com>. Diakses pada tanggal 3 agustus 2017.

b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c. Kekerasan secara verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan.

d. Kekerasan seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa seksual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Menurut Soharto mengelompokkan kekerasan terhadap anak menjadi :²²

- a. Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu. Yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan ada tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan dibagian paha lengan, jari-jari telapak tangan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak yang tidak disukai orang tuannya, seperti anaknya nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air dan muntah disembarang tempat, atau memecahkan barang berharga.
- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi kepada anak.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak-anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (insect, perkosaan dan eksploitas seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitas anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan yang layak terhadap anak. Eksploitas anak merujuk pada tindakan

²²Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Nuansa, 2006), h. 39.

diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya.

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Anak

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Ada ketentuan yang terlarang dalam masyarakat kita, misalnya dalam praktik pengasuhan anak, pembiasaan bekerja sejak kecil kepada anak dan masih banyak praktik-praktik lain yang merugikan anak yang “berlindung” atas nama adat budaya. Misalnya dalam pola pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan ini acap masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik (cambuk, samblek, pecut, tendang, atau tempeleng), verbal (pisuh, umprat, damprat, atau cemooh) maupun kekerasan dalam bentuk pengisolasi sosial. Penelitian Mustain, misalnya tentang tindak kekerasan dalam keluarga di Surabaya (1997) membuktikan masih banyaknya praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dikemukakan Mustain bahwa yang paling sering menjadi sasaran kemarahan dan kejengkelan orang tua (ayah) ialah anak-anak. Jika sang ayah sedang marah tidak jarang anak ditendang dan ditempeleng. Yang menarik hampir tidak ada reaksi yang berarti dari orang lain (tetangga) terhadap perlakuan kasar dan keras tersebut. Para

tetangga menilai persoalan kekerasan terhadap anak yang dilakukan tetangga-nya ialah urusan intern mereka sendiri. Itu mereka lakukan juga dalam rangka “mendidik” anak-anaknya yang dinilai membandel dan membangkang orang tua.²³

Sejumlah studi juga menemukan bahwa gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya penganiyaan atau penelantaran anak karena proses berfikir atau keputusan orang tua menjadi terganggu. Orang tua yang psikotik (gila) atau mengalami gangguan kepribadian yang parah mungkin memandang anaknya ialah jelek atau anak dinilai mencoba membuat dia menjadi gila. Beberapa karakteristik orang tua yang potensial melakukan tindak kekerasan pada anak-anaknya ialah: orang tua yang agresif dan impulsive, orang tua tunggal, orang tua muda, terjadi gangguan dalam perkawinan seperti perceraian, konflik dalam keluarga misalnya dengan mertua, keluarga yang memiliki banyak anak, orang tua yang kecandungan atau alkohol, keluarga di daerah baru tanpa teman, dan orang tua yang kurang berpendidikan

Dalam versi yang lebih lengkap, seorang pemerhati masalah anak dari Malaysia yakni Siti Fatimah (1992) mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang dilakukan terhadap anak. `yaitu:²⁴

1. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memperhatikan atau

²³Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 31.

²⁴Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010),h. 32

kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan dalam kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat memengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

2. Masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Bagi para orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti; cacat fisik atau mental (idiot) ucap kali kurang dapat mengendalikan kesabaran sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa terbebani atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.
3. Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan tidak jarang dilakukan oleh pihak ayah atau ibu tiri tersebut.
4. Kelahiran anak-anak di luar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi

jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dan bentuk kekerasan yang lainnya.

5. Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Dalam berbagai kajian psikologis disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiyaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis. Mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan (*anxiety*) dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara tipologis yang menandai situasi tersebut antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak yang baik.
6. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

Dalam sebuah model yang disebut “*The Abusive Environment Model*” Ismail menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak-anak sesungguhnya dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:²⁵

1. Aspek kondisi sang anak sendiri. Kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak dapat terjadi karena faktor pada anak, seperti: anak yang mengalami kelahiran premature, anak yang mengalami sakit sehingga mendatangkan masalah, hubungan yang tidak harmonis sehingga memengaruhi watak, adanya proses kehamilan atau kelahiran yang sulit, kehadiran anak yang tidak dikehendaki, anak

²⁵Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 35-36.

yang mengalami cacat baik mental maupun fisik, anak yang sulit diatur sikapnya, dan anak yang meminta perhatian khusus.

2. Faktor pada orang tua meliputi: pernah tidak orang tua mengalami kekerasan atau penganiyaan sewaktu kecil, menganggur atau karena pendapatan tidak mencukupi, pecandu narkoba atau peminum alkohol, pengasingan sosial atau dikucilkan, waktu senggang yang terbatas, karakter pribadi yang belum matang, gangguan emosi atau kekacauan urat saraf yang lain mengidap penyakit jiwa. Seringkali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda, sehingga belum matang, terutama sekali mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
3. Faktor lingkungan sosial seperti: kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua sendiri, status wanita yang rendah, sistem keluarga patriarkat, nilai masyarakat yang terlalu individualistis dan sebagainya.

D. Dampak Kekerasan Terhadap Anak-Anak

Moore (dalam Nataliani, 2004) menyebutkan bahwa efek tindakan dari korban penganiyaan fisik dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Ada anak yang menjadi negatif dan agresif serta mudah frustrasi; ada yang menjadi sangat pasif dan apatis; ada yang tidak mempunyai kepribadian sendiri; ada sulit menjalin relasi dengan individu lain dan adapula yang timbul rasa benci yang luar biasa terhadap dirinya sendiri. Selain itu Moore juga menemukan adanya kerusakan fisik, seperti perkembangan tubuh kurang normal juga rusaknya system syaraf.

Berikut ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan terhadap anak, antara lain:²⁶

1. Dampak kekerasan fisik.

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya akan menjadi sangat agresif dan setelah menjadi orang tua akan berlaku kejam pada anak-anaknya. Orang tua agresif melahirkan anak-anak yang agresif, yang pada gilirannya akan menjadi orang dewasa yang menjadi agresif. Lawson (dalam Sitohang, 2004) menggambarkan bahwa semua jenis gangguan mental ada hubungannya dengan perlakuan buruk yang diterima manusia ketika dia masih kecil. Kekerasan fisik yang berlangsung berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka secara fisik hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

2. Dampak kekerasan psikis

Unicef mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi yang sering penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk seperti *bulimia nervosa* (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, kecanduran alkohol dan obat-obatan, memiliki dorongan bunih diri. Menurut Nadia, kekerasan psikologis sukar diidentifikasi atau diagnose karena tidak meninggalkan bekas yang termanifestasikan dalam beberapa bentuk seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, peyalahgunaan obat dan alkohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3. Dampak kekerasan seksual

²⁶<https://www.duniapsikologi.com>. Kekerasan terhadap anak .diakses pada tanggal 10 juli 2017.

Menurut Mulyadi (sinar harapan, 2003), diantara korban yang masih merasa dendam terhadap pelaku, takut menikah, merasa rendah diri, dan trauma akibat eksploitasi sesuai, meski kini mereka sudah dewasa. Bahkan eksploitasi seksual yang dialami semasa anak-anak banyak ditenggarai sebagai penyebab keterlibatan dalam prostitusi. Jika seksual terjadi terhadap anak yang masih kecil pengaruh buruk yang ditimbulkan antara lain dari yang biasanya mengompol jadi mengompol, merasa takut, perubahan pola tidur, kecemasan yang tidak beralasan, atau bahkan simtom fisik seperti sakit perut atau masalah kulit, dan lain-lain

4. Dampak penelantaran anak

Pengaruh yang paling terlihat jika anak mengalami ini adalah kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, Hurlock mengatakan jika anak kurang kasih sayang dari orang tua menyebabkan perkembangannya perasaan tidak aman, gagal mengembangkan perilaku akrab, dan selanjutnya akan mengalami penyesuaian diri pada masa yang akan datang

5. Dampak kekerasan lainnya

Dampak kekerasan terhadap anak lainnya adalah kelalaian dalam mendapatkan pengobatan menyebabkan kegagalan merawat anak dengan baik. kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

Adapun Solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu:²⁷

²⁷Nurul Huda, *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis* (Pena Justisia, 2008), h. 93.

1. Pendidikan dan pengetahuan orang tua yang cukup

Dari beberapa faktor yang telah kita bahas diatas, maka perlu kita ketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak, sangat berpengaruh terhadap perkembangannya baik psikis maupun fisik mereka. Oleh karena itu, perlu kita hentikan tindak kekerasan tersebut. Dengan pendidikan yang lebih tinggi dan pengetahuan yang cukup diharapkan orang tua mampu mendidik anaknya kearah perkembangan yang memuaskan tanpa adanya tindak kekerasan.

2. Keluarga yang sangat hangat dan demokratis

Psikolog terpesona dengan penelitian Harry Harlow pada tahun 60-an memisahkan anak-anak monyet dari Ibunya, kemudian ia mengamati pertumbuhannya. Monyet itu ternyata menunjukkan perilaku yang mengenaskan, selalu ketakutan, tidak dapat menyesuaikan diri dan rentan terhadap berbagai penyakit. Setelah monyet-monyet itu besar dan melahirkan bayi-bayi lagi, mereka menjadi ibu-ibu yang galak dan berbahaya. Mereka acuh tak acuh terhadap anak-anaknya dan seringkali melukainya.

Dalam sebuah study terbukti bahwa IQ anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya acuh tak acuh, bermusuhan dan keras, atau *broken home*, perkembangan IQ anak mengalami penurunan dalam masa tiga tahun, sebaliknya anak yang tinggal di rumah yang orang tuanya penuh pengertian, bersikap hangat penuh kasih sayang dan menyisihkan waktunya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, menjelaskan tindakannya, member kesempatan anak untuk mengambil keputusan, berdialog dan diskusi, hasilnya rata-rata IQ (bahkan kecerdasan emosi) anak mengalami kenaikan sekitar 8 point hasil penelitian R. Study juga membuktikan bahwa 63% dari anak nakal pada suatu lembaga

pendidikan anak-anak dilenken (nakal), berasal dari keluarga yang tidak utuh (*broken home*). Kemudian hasil penelitian *K. Gottschaldt di Leipzig* (Jerman) menyatakan bahwa 70,8% dari anak-anak yang sulit di didik ternyata berasal dari keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat.

3. Membangun komunikasi yang efektif

Kunci persoalan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga. Sehingga yang muncul adalah stereo typing (stigma) dan predijuce (prasangka). Dua hal itu kemudian mengalami proses akumulasi yang kadang dibumbui intervensi pihak ketiga.

E. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang di amandemen atas perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tahun 2014, merupakan fondasi utama dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang terlibat kasus hukum, karena aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata Negara, dan hukum perdata, khususnya di Indonesia pembicaraan

mengenai perlindungan hukum di mulai tahun 1997 dalam seminar perlindungan anak yang diadakan prayuwana. Dalam seminar itu menghasilkan dua point penting yang harus diperlukan dalam perlindungan anak yaitu:²⁸

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0-21 tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Pergerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi terjadi di Negara-negara alain seperti di Amerika Serikat dengan Negara bagiannya Chicago dan illionis sejak tahun 1899. Mulai saat itu sudah berfokus pada upaya perlindungan dan pemberian kesejahteraan terhadap anak dengan gebrakan baru dalam peradilan dimana proses peradilan dibedakan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan tujuan melindungi anak dari penerapan hukum bagi orang dewasa.

²⁸Marlina.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h.32.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat penting. Sebab jenis penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan riset. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.¹

Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.²

Berdasarkan pada kedua pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam penulis ini dimaksudkan untuk menggali atau mendalami suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Olehnya itu, penulis langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan kasus terjadinya kekerasan terhadap anak.

¹Lexy J. Majeleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosyada Karya, 1995), h. 15.

²Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 14.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih penulis di Kabupaten Bulukumba yaitu pada Polres Bulukumba. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan ada beberapa kasus terjadinya kekerasan terhadap anak di Polres Bulukumba.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan paparan tentang penelitian kualitatif diatas, adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.³

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

³ <http://lp3madiliIndonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>
(1 Juli 2017)

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Bulukumba dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas. Sumber data primer di peroleh dari Ketua Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dan penyidik karena informan tersebut memiliki data-data kasus kekerasan terhadap anak.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *library research* dengan jalan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan kartu data. Metode yang digunakan penulis, antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴ Hal yang hendak diobservasi harus diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun memengaruhi observasi yang dilakukan.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara. Secara konsep, Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵

Interaksi dan komunikasi yang dimaksud adalah dialog, yang bersifat tanya jawab. Pada interaksi dan komunikasi ini, terlibat dua faktor yaitu pewawancara dan narasumber atau responden. Pewawancara merupakan pihak yang bertanya sedangkan narasumber atau responden adalah pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pihak pewawancara.

Pada konteks ini, peneliti berperan sebagai pewawancara yang akan mewawancarai Ketua Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) dan penyidik. Alasan memilih narasumber tersebut karena ia memiliki data-data kasus kekerasan terhadap anak dan pernah menangani kasus terjadinya kekerasan terhadap anak. Adapun teknisnya, peneliti menggunakan teknik wawancara langsung atau wawancara secara *face to face* .

⁴Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2007), h. 70.

⁵ Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Cet.V; Jakarta: PT BumiAksara, 2004), h.58

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh data yang tidak langsung berasal dari obyek penelitian yang diteliti. Dengan kata lain bahwa peneliti juga menghimpun data dari dokumen-dokumen yang bersangkutan serta data dari internet maupun beberapa literature. Adapun dokumentasi yang akan diperoleh secara primer langsung dari Kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan, data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrument harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, maka dari itu instrument yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : daftar pertanyaan penelitian, camera, pulpen, dan buku tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan berasal dari kata olah yang berarti mengerjakan, mengusahakan supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Pengolahan berarti proses, cara, pembuatan mengolah.

Data berarti keterangan yang benar dan nyata dan atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Data adalah fakta empiric yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai

sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.

Jadi, pengolahan data ialah proses, cara, pembuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana.

b. Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dengan mudah dapat dipahami. Susun stainback juga memberikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan analisis data. Ia mengemukakan bahwa analisis data adalah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif, yang mana hal itu digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dari data yang diperoleh sehingga data tersebut dapat dikembangkan dan dievaluasi.⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu tahapan pada penelitian yang didalamnya terdapat sebuah proses, yang mana proses itu berupa perorganisasian data, penjabaran data, penafsiran data serta penyimpulan data yang telah ditafsirkan sebelumnya. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁷

⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 244.

⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, h. 246.

1. Data reduction (Reduksi Data)

Pada tahap awal ini, peneliti berupaya untuk merangkum data-data yang telah peneliti dapatkan ketika melakukan observasi, wawancara serta data dari sumber dokumen lain. Atau dengan kata lain pada tahap ini peneliti memilih data-data yang pokok atau relevan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data display (Penyajian Data)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data pokok yang telah dirangkum sebelumnya kedalam bentuk bagan dan penjelasan data dalam bentuk teks. Peneliti memberikan pemaparan tentang data-data yang ditemui dan telah difilter pada tahap sebelumnya. Pemaparan tersebut berupa penafsiran atau penerjemahan data, agar kemudian dapat dipahami.

3. Conclusion drawing/verification (Penarikan Kesimpulan)

Pada tahap terakhir ini, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan penafsiran data pada tahap sebelumnya.

BAB IV

**PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KABUPATEN
BULUKUMBA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK)**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.

Batas-batas wilayahnya adalah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
- c. Sebelah Timur: Teluk Bone
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

Di Kabupaten Bulukumba memiliki 10 kecamatan, yaitu

- 1. Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
- 2. Gangking

3. Bulukumpa
4. Ujungloe
5. Bontobahari
6. Bontotiro
7. Kajang
8. Herlang
9. Rilau Ale
10. Kindang

Dari 10 kecamatan yang ada saat ini, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya adalah sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa.¹

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bulukumba

Penulis telah melakukan penelitian wawancara dengan penyidik di Polres Bulukumba yang di wakili oleh Kanit PPA (Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) dan anggota penyidik terkait dengan masalah kekerasan terhadap anak yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Adapun hasil penelitian yang dapat dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini

¹<http://id.Wikipedia.org/wiki/geografisbulukumba>. Diakses pada tanggal 24 juli 2017 pukul 22.15 .

No	Bentuk-bentuk Kekerasan	2015	2016	2017
1	Kekerasan Fisik	21 Kasus	57 Kasus	30 Kasus
2	Kekerasan psikis	-	2 Kasus	-
3	Kekerasan Seksual	6 Kasus	10 Kasus	21 Kasus
	Jumlah	27 Kasus	69 Kasus	51 Kasus

Sumber: Data Tindak Kekerasan Tahun (2016-2017) Kantor Polres Bulukumba

Dari hasil penelitian dapat dilihat di Kabupaten Bulukumba menemukan bahwa secara garis besar terdapat tiga bentuk kekerasan yang selama ini menimpa dan dialami anak-anak, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik antara lain memukul, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menguncang. Kekerasan seksual, mulai dari sekadar dirayu, dicolek, dirangkul secara paksa, hingga melakukan hubungan seksual dengan anak secara paksa seorang anak. Kekerasan psikis antara lain mengancam, mengabaikan kebutuhan anak dan tidak merawat. Dari tahun 2015 sebanyak 27 kasus, di tahun 2016 sebanyak 69 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 51 kasus. Semua hanya sebatas kasus yang terlanjur merebak keluar, dan di luar itu dapat dipastikan masih sangat banyak kasus serupa yang belum sempat terekspos karena berbagai alasan,

Menurut Kanit PPA (ketua unit pelayanan perempuan dan anak) Ibu Rosmina S.IP terjadinya kekerasan karena seseorang yang memiliki pendidikan atau iman yang kurang dan adanya kesalahpahaman antara yang satu dengan yang lain. Faktor-faktor

yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba yaitu:²

1. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang tidak mencukupi dapat membuat orang tua stress dan kemudian melampiaskannya pada anak. Peneliti menemukan kasus bahwa para pelaku dan juga korban kekerasan anak kebanyakan berasal dari kelompok sosial ekonomi yang rendah. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan, ia sangat sensitif dan mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anak-anak sehingga terjadilah kekerasan emosional. Pada saat itu bapak membentak anak di hadapan banyak orang. Terjadi kekerasan verbal. Kejengkelan yang bergabung dengan kekecewaan timbullah kekerasan fisik dengan mencambuk anaknya sendiri.

2. Faktor Regenerasi Kekerasan Terhadap Anak

Seorang yang sewaktu masa kecil ia memperoleh tindakan kekerasan dan ia memiliki anak, dia memiliki potensi untuk hal yang sama dengan apa yang dialaminya sewaktu kecil. Dia beranggapan bahwa tindakannya adalah hal yang wajar untuk mendidik anak.

3. Faktor Kelainan Seksual

Dimana si pelaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

4. Faktor Kesalahpahaman

²Rosmina, S.IP (Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak), *Wawancara*, di Kantor Polres Bulukumba pada tanggal 11 juli 2017.

Faktor ini sering terjadi pada anak ke anak, terutama anak sekolah, anak yang aktif di media sosial.. Contohnya membuat status atau memposting hal-hal yang dapat menyinggung di facebook.

C. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Kekerasan Anak

a. Menurut Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Dalam hukum Islam kekerasan terhadap anak tidak membolehkan atau mengharamkan atas tindakan kekerasan walaupun itu kekerasan psikis. Sebagaimana kita umat muslim wajib mengingat dan mengajak untuk melakukan kebaikan dan menjalankan kaidah-kaidah agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Tejemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”³

Hikmah yang dimaksud ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. Jadi didalam hukum Islam hendaklah kita berbuat baik kepada umat muslim.

Kekerasan dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2013), h. 429

dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenal badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tidak terganggu.⁴

Islam secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak. Generasi yang tangguh dan berakhlak mulia adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diterapkan oleh Islam. Pendidikan yang dimaksud oleh agama Islam bukanlah pendidikan yang hanya berdomisili di lingkungan sekolah (formal) saja, melainkan segala bentuk tingkah laku yang dilihat oleh anak dan memiliki potensi untuk ditiru oleh anak.

Salah satu hadist mengatakan “Perintahlah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan untuk melaksanakan sholat”. Hadist tersebut seakan-akan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam mendidik anak tidak diperbolehkan adanya hukuman/kekerasan fisik pada anak. Namun, adanya hadist ini bukanlah semata-mata tanpa adanya alasan yang jelas. Hukuman fisik yang diberikan bukanlah hukuman yang mampu menimbulkan efek traumadan cedera pada anak. Hukuman fisik yang terlalu berlebihan justru itu bukan cara mendidik yang benar.

Kekerasan dalam Islam tidak diperbolehkan sejauh tidak sesuai dan melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah akhir yang ditempuh orang tua.

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 179.

Kekerasan juga hanya mendidik bukan dengan tujuan untuk menghukum tanpa dasar yang jelas, tanpa alasan dan tanpa adanya ilmu. Justru jika anak dibiarkan bebas tanpa control orang tua, maka akan berdampak buruk bagi anak. Anak akan bertindak semaunya sendiri tanpa pengawasan orang tua, melupakan rasa hormatnya kepada orang tua, masuk ke dalam pergaulan bebas dan akan timbul sifat-sifat lain yang justru tidak diinginkan oleh orang tua.

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai orang lain. Menurut para Fukaha, tindak pidana atau selain jiwa (penganiyaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa di gambarkan, sehingga masuk didalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya dan lain-lain.⁵

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perbuatan menyakiti badan anak tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Kekerasan yang terjadi terhadap anak seperti memukul, mencambak rambut, menyulut benda tajam dan kekerasan lainnya.

b. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak tentang Kekerasan Terhadap Anak

Menurut penyidik Ibu Alifah “ kekerasan adalah kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang atau keluarga terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti

⁵Ensiklopedi *Hukum Pidana Islam* IV, (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2008), h. 19.

orang tidak berdaya.⁶ Maka dari itu perlu adanya aturan-aturan di Negara kita, agar pemerintahan dan masyarakat harus benar-benar bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak, minimalnya dapat berkurang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiyaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 tahun 2002 secara mutlak memberikan berbagai bentuk

⁶Ibu Alifah (Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak), *Wawancara*, di Kantor Polres Bulukumba pada tanggal 11 juli 2017.

⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategi dalam bahasa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena itu, kondisi sebagai anak maka perlu perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik fisik, mental dan rohani. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak anak dan kewajiban anak sebagai berikut:

- a. Hak hidup, tumbuh dan berkembang, terdapat dalm pasal 4.
- b. Hak atas kewarganegaraan, terdapat dalam pasal 5.
- c. Hak atas orang tua, terdapat dalam pasal 7 ayat (1).
- d. Hak atas kesejahteraan sosial, terdapat dalam pasal 12.
- e. Hak atas perlindungan, terdapat dalm pasal 13 ayat (1).
- f. Hak atas memperoleh perlindungan dari ancaman, terdapat dalam pasal 15.
- g. Hak atas perlindungan dan kebebasan sesuai dengan hukum, terdapat dalam pasal 16 ayat (1) dan (2).
- h. Hak atas perlakuan secara manusiawi , terdapat dalam pasal 17 ayat (1) dan (2).

Secara tegas dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :⁸

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan
- f. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada pasal 15 undang-undang ini yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual.

Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:⁹

Pasal 54 ayat (1) berbunyi:

“Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan atau pihak lain.

Pasal 54 ayat (2) berbunyi:

“Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah dan masyarakat”

Perlindungan yang diberikan yang dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak

⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 54 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Selanjutnya dalam hal yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur pasal 71D.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah dijelaskan larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak, seperti tersirat dalam pasal 76C yang berbunyi:

“setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, ata menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Dari pasal tersebut sudah jelas diatur dalam Undang-Undang tersebut, lantas hukuman terkait dengan pasal ini adalah pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 apabila yang melakukan penganiyaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 di atas dapat dijelaskan bahwa anak perlu di lindungi dari adanya tindak kekerasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut :
 - a. Faktor Ekonomi: Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga yang sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan tindak kekerasan.
 - b. Faktor Regenerasi kekerasan terhadap anak: orang yang semasa kecilnya pernah mengalami kekerasan atau orang tua yang kurang memahami kebutuhan anak dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah.
 - c. Faktor Kelainan Seksual: orang yang mempunyai kelainan seksual yang ingin selalu melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya
 - d. Faktor Kesalahpahaman: faktor ini terdapat pada anak itu sendiri dengan orang lain yang dapat menimbulkan kekerasan.
2. Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Kekerasan Anak memandang bahwa dalam hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, tindakan kekerasan terhadap anak sangat dilarang. Karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap anak karena tidak

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang ini hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Akan tetapi dari kedua sumber hukum tersebut memberikan toleransi “kekerasan” selama hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental sebagai sarana pendidikan terhadap anak, namun tidak melanggar terhadap hak-hak seorang anak. Baik Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

B. *Implikasi Penelitian*

1. Diharapkan kepada kanit PPA (pelayanan perempuan dan anak) agar selalu bersabar dalam menghadapi kasus kekerasan terutama kekerasan terhadap anak karena telah menjadi tugas orang kanit PPA untuk memperlakukan, melayani dan memberikan solusi bagi para pelaku dan korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan kewajibannya agar mereka mampu menjalankan perintah Allah swt dan menjauhi segala larangannya.
2. Dengan dilakukan perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat luas tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Perlindungan Anak serta akibat hukumannya atau sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak yang dapat disebarkan melalui sosialisai ke sekolah-sekolah ataupun pengajian umum.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU DAN KAMUS

- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo, 1989.
- Hamid, Sholahuddin. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, 2004
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Huda, Nurul. *Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis*. Pena Justisia, 2008
- Irma, Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Joni, Muhammad. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT.Citra Aditya, 1999.
- Kanang, Abdul Rahman. *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan hak-hak Konstitusional Anak*. Alauddin: University Press, 2011.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*. Bandung :PT. Alumni, 2001.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdaya Karya, 1995
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007
- Nashriani. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung: PT.Citra aditya bakti, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Santy Dellyana, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

TM, Fuaduddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Yunani Purba, 1999.

Usman dkk, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

<http://id.Wikipedia.org/wiki/geografisbulukumba>. Diakses pada tanggal 24 juli 2017 pukul 22.15

<http://psikologi.or.id/kekerasanterhadapanak>. Di akses pada tanggal 28 juli 2017

<http://www.pikiranrakyat.com/kekerasanterhadapanak>. Diakses pada tanggal 3 agustus 2017.

<http://lp3madiliIndonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html> (1 Juli 2017)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto: Dokumentasi wawancara di Kantor Polres Bulukumba dengan Ibu Rosmina S,IP Sebagai Kanit PPA pada Tanggal 18 Oktober 2016.

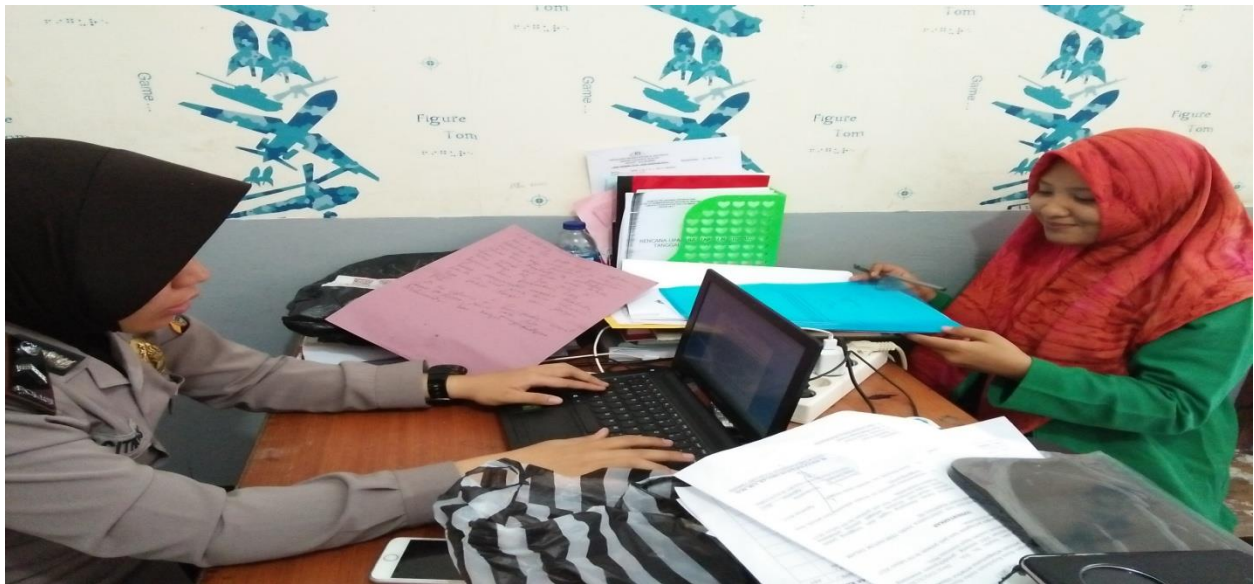


Foto: Dokumentasi wawancara di Kantor Polres Bulukumba dengan Ibu Andi Bau Ismi Alifah dan Ibu Andi Citra sebagai penyidik pada tanggal 18 Juli 2017



Foto: Dokumentasi wawancara di Kantor Polres Bulukumba dengan Ibu Rosmina sebagai Kanit PPA pada tanggal 18 Juli 2017



Foto: Dokumentasi wawancara di Kantor Polres Bulukumba dengan Bapak Ashar sebagai penyidik pada tanggal 18 Juli 2017

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

1. Apakah di Kabupaten Bulukumba pernah terjadi kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana pendapat anda tentang kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bulukumba?
3. Apakah dari tahun ke tahun tingkat kekerasan terhadap anak ada peningkatan atau sebaliknya ?
4. Kasus kekerasan seperti apa yang Bapak pernah tangani?
5. Bagaimana kronologis kejadiannya?
6. Mengapa pelaku melakukan perbuatan tersebut?
7. Hukuman apa yang diberikan kepada pelaku?
8. Bagaimana cara mengatasi tentang adanya kekerasan tersebut?
9. Apakah kekerasan anak merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)?

PENGESAHAN DRAFT PROPOSAL

Nama : Hikmah Tunnisa, M

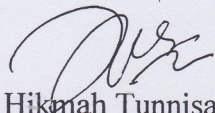
Nim : 10400113036

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Proposal : Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Samata, 8 Juni 2017

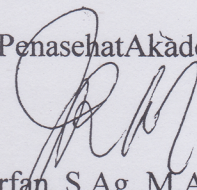
Penyusun



Hikmah Tunnisa, M

NIM: 10400113036

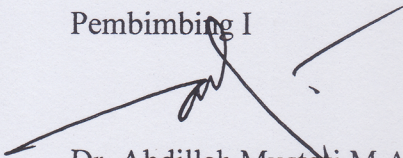
Penasehat Akademik



Irfan, S.Ag., M.Ag

NIP: 19710518 200003 1 002

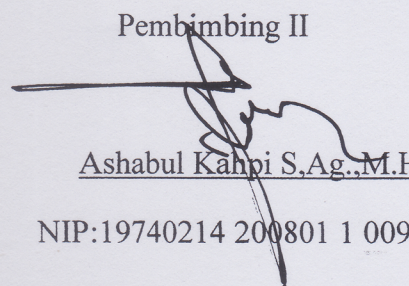
Pembimbing I



Dr. Abdillah Mustari, M.Ag

NIP: 19730710 200003 1 004

Pembimbing II



Ashabul Kahpi S, Ag., M.H

NIP: 19740214 200801 1 009

Mengetahui

Kajun Sekjur



Dr. Abdillah Mustari, M.Ag

NIP: 19730710 200003 1 004

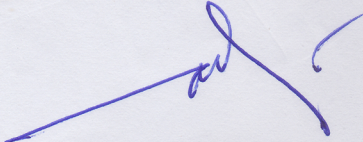
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Hikmah Tunnisa.M, NIM: 10400113036, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, "Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

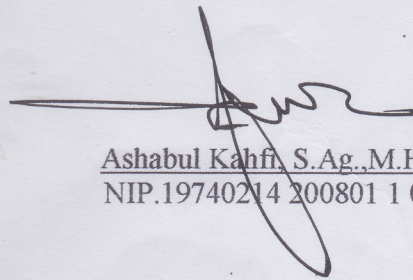
Samata, 8 Agustus 2017

Pembimbing I



Dr. Abdillah Mustari, M. Ag
NIP.19730710 200003 1 004

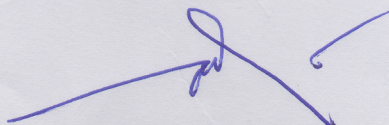
Pembimbing II



Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H
NIP.19740214 200801 1 009

Mengetahui:

Ketua jurusan PMH



Dr. Abdillah Mustari, M. Ag
NIP.19730710 200003 1 004

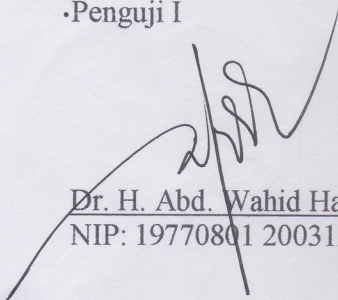
PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji penulisan skripsi saudara **HIKMAH TUNNISA.M**, NIM : **10400113036** mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah mengoreksi secara saksama skripsi dengan judul : **Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengikuti sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk digunakan lebih lanjut.

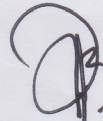
Samata , 14 Agustus 2017

•Penguji I



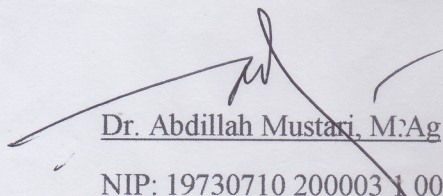
Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.HI
NIP: 19770801 200312 1 002

Penguji II



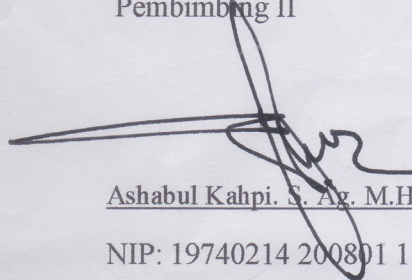
A. Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag
NIP: 19720719 200003 2 002

Pembimbing I



Dr. Abdillah Mustari, M.Ag
NIP: 19730710 200003 1 004

Pembimbing II



Ashabul Kahpi, S. Ag. M.H
NIP: 19740214 200801 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Sl. Alauddin No. 36 SamataSungguminasa- GowaTlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : Sl. 1/PP.00.9061/2017

Samata, 12 Juni 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada

Yth Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2t, BKPM D Prov. Sul-Sel

Di
Makassar

Assalamu' Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Hikmah Tunnisa M
Nim	: 10400113036
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Samata, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul skripsinya :

Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Abdillah Mustari, M.Ag

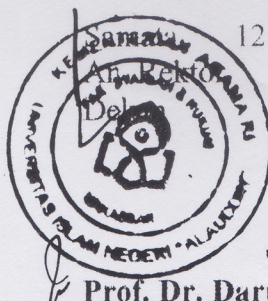
: 2. Ashabul Kahpi S, Ag, M.H

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian pada tanggal 19 Juni 2017 s/d 19 Juli 2017 di Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapakan terima kasih.

Wassalam

12 Juni 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR BULUKUMBA
Jalan Jenderal Sudirman No. 08 Bulukumba 92511



SURAT KETERANGAN

Nomor. : SK / **SK** / VII / 2017 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA,
Kaur Bin Opsnal Sat RESKRIM :

Nama : **SABRI, SH**
Pangkat / Nrp : **IPTU / 74030396**
Jabatan : **KAUR BIN OPS SAT RESKRIM POLRES BULUKUMBA**

Menerangkan dengan sebenar – benarnya , bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **HIKMAH TUNNISA, M**
Nomor Pokok : **10400113036**
Instansi / Pekerjaan : **PMH**
Alamat : **Jl. Bahagia Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.**

Berdasarkan Surat dari BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA Nomor : 430 / balitbangda / VII / 2017 perihal
Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini menjelaskan bahwa yang tersebut namanya diatas benar telah diterima
melakukan Penelitian di Polres Bulukumba dalam Rangka Penyusunan **SKRIPSI** dengan
Judul ” **PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KAB. BULUKUMBA**
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU. PERLINDUNGAN ANAK “ dari tanggal 19 Juni
2017 S/d 19 Juli 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan
seperlunya .

Bulukumba , 19 Juli 2017
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA
Kaur Bin Opsnal Sat RESKRIM

KEPALA
SABRI, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 74030396

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 1270 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH /SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
Nama : Hikmah Tunnisa M
N I M : 10400113036
Jurusan : Perbandingan MAzhab dan Hukum (PMH)
Hari/Tanggal : Kamis / 24 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan di KABUPATEN
Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Perlindungan Anak)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian
Munaqasyah /Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk
Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998
tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin
Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 juncto Peraturan Menteri Agama RI
Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 tahun 2016 tentang Pedoman
Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Penguji I : Dr. H. Abd. Wahid HAddade, Lc., M.H.I.
Penguji II : Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
2. Nurhayati Wahid

- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : 2351/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 22 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekretaris)
 3. Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.H.I. (Penguji I)
 4. Andi Intan Cahyani, S.Ag., M.Ag. (Penguji II)
 5. Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing I)
 6. Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah/Skripsi Atas Nama :

Nama : Hikmah Tunnisa M
N I M : 10400113036
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah /Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Agustus 2017
Waktu : Pukul 11.00–12.00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Makassar pada tanggal 28 Agustus 1995, sebagai anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri Mursalim dan Nursiah. Penulis mengawali masa pendidikannya di SD Negeri 14 Babana pada tahun 2001 dan lulus pada tahun 2007. Penulis memasuki jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Bulukumba dan tamat pada tahun 2010 dan menyelesaikan studi di SMA Negeri 9 Bulukumba pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Syari'ah dan Hukum mengambil jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dengan judul karya tulis ilmiah (skripsi) "Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kabupaten Bulukumba (Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak)".